

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Marga dan Hutan Rakyat

1. Hutan Marga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa hutan adat/marga adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah. Warsito (2005) menyebutkan bahwa hutan adat tidak selalu berada dalam kawasan hutan negara, melainkan juga dimungkinkan berada di dalam hutan hak yang dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum adat.

2. Hutan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan rakyat dikategorikan sebagai hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Selain itu juga, menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999, pengembangan hutan rakyat diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi lahan di luar

kawasan hutan negara, penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan oleh masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan kayu sebagai bahan baku bangunan, bahan baku industri, penyediaan kayu bakar, usaha perbaikan tata air dan lingkungan, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan hutan negara.

Hutan rakyat merupakan sumberdaya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Hutan rakyat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, ditujukan untuk menghasilkan kayu atau komoditas yang secara ekonomis bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya hutan rakyat tradisional yang diusahakan masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah, baik berupa tanaman satu jenis maupun dengan pola tanaman campuran (agroforestri) (Awang, 2005).

Lembaga Penelitian IPB (1983) dalam Purwanto (2004) membagi hutan rakyat dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hutan rakyat murni (*monoculture*), yaitu hutan rakyat yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman pokok berkayu yang ditanam secara homogen atau monokultur.
2. Hutan rakyat campuran (*polyculture*), yaitu hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.
3. Hutan rakyat wana tani (*agroforestry*), yaitu yang mempunyai bentuk usaha kombinasi antara kehutanan dengan cabang usaha tani

lainnya seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang dikembangkan secara terpadu.

Pengembangan hutan rakyat dengan komoditi tertentu dapat memperbaiki mutu lingkungan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim mikro yang baik, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan erosi. Hal tersebut menjadikan hutan rakyat sebagai salah satu teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif (Purwanto, 2004).

Pada penelitian Darusman dan Hardjanto (2006) mengenai tinjauan ekonomi hutan rakyat, hutan rakyat sampai saat ini diusahakan oleh masyarakat di pedesaan, sehingga kontribusi manfaat hutan rakyat akan berdampak pada perekonomian desa. Manfaat ekonomi hutan rakyat secara langsung dapat dirasakan masing-masing rumah tangga para pelakunya dan secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian desa.

Pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih diposisikan sebagai pendapatan sampingan dan bersifat insidental dengan kisaran tidak lebih dari 10% pendapatan total yang mereka terima. Hal ini disebabkan karena pengusahaan hutan rakyat masih merupakan jenis usaha sambilan (Darusman dan Hardjanto, 2006).

B. Kebutuhan Hidup

Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan dan keperluan yang semuanya menghendaki pemenuhan. Kebutuhan manusia selalu tidak terbatas baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun segi mutu dan ragam (kualitatif). Kebutuhan untuk memenuhi keperluan manusia sehingga manusia mampu untuk bertahan hidup disebut kebutuhan ekonomi (Chourmain, 1998). Menurut sifatnya kebutuhan manusia dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara wajar, seperti sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), papan (tempat tinggal). Sedangkan kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok, misalnya kendaraan, pendidikan, perhiasan dan sebagainya (Chourmain, 1998).

Menurut Hernanto (1988) untuk memenuhi kebutuhan hidup, petani dan keluarganya membutuhkan sejumlah biaya atau pendapatan. Biaya hidup itu diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Dari sumber usahatani sendiri
2. Dari sumber usaha lain di bidang pertanian seperti halnya upah tenaga kerja pada usahatani lain (buruh tani)
3. Pendapatan dari luar usahatani.

Menurut Hernanto (1988) alokasi pendapatan yang diperoleh tersebut antara lain digunakan untuk :

1. Kegiatan produktif antara lain untuk membiayai kegiatan usahataninya
2. Kegiatan konsumtif antara lain untuk pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan pajak-pajak
3. Pemeliharaan investasi
4. Investasi dan tabungan.

Penelitian Achmad dan Okan (2008) menggambarkan kontribusi hasil hutan bukan kayu masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan. Hal ini terlihat dari kondisi umum masyarakat hutan (Dusun Pampli) yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang nampak kurang sejahtera. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal masyarakat berkaitan dengan gaya hidup seperti jumlah tanggungan anak, kebutuhan rokok dan kebiasaan berjudi, rendahnya semangat kerja sedangkan faktor eksternal yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka seperti peralatan/fasilitas kerja, mahalnya biaya transportasi.

C. Penerimaan, Biaya Produksi, Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

1. Penerimaan Rumah Tangga

Menurut Soekartawi (2002) penerimaan adalah perkalian antara hasil produksi dengan harga jual. Perhitungan total penerimaan dapat dilakukan melalui 2 macam analisis yaitu:

- a) Analisis parsial, yaitu jika sebidang lahan ditanami 3 tanaman secara monokultur (misalnya tanaman padi, jagung, dan ketela pohon), dan bila tanaman yang akan diteliti adalah salah satu macam tanaman saja.
- b) Analisis keseluruhan, yaitu jika sebidang lahan ditanami 3 tanaman secara monokultur (misalnya tanaman padi, jagung, dan ketela pohon), dan bila tanaman yang akan diteliti adalah tanaman ketiganya.

Menurut Hastuti dan Rahim (2007) dalam menghitung penerimaan usahatani, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a) Hati-hati dalam menghitung produksi pertanian karena tidak semua produksi pertanian dapat dipanen secara serentak
- b) Hati-hati dalam menghitung penerimaan karena produksi mungkin dijual beberapa kali sehingga diperlukan data frekuensi penjualan, selain itu produksi juga mungkin dijual dalam beberapa kali dengan harga jual yang berbeda-beda
- c) Jika penelitian usahatani menggunakan responden petani, diperlukan teknik wawancara dengan baik untuk membantu petani mengingat produksi dan hasil penjualan yang diperoleh selama setahun terakhir.

Adapun Hernanto (1988), berpendapat bahwa penerimaan usahatani (*farm receipts*), yaitu penerimaan dari semua sumber usahatani meliputi :

- a) Jumlah penambahan inventaris
- b) Nilai penjualan hasil
- c) Nilai penggunaan rumah dan yang dikonsumsi.

Penjualan hasil tanaman ataupun hasil ternak harus mencapai harga yang paling menguntungkan. Karena dibalik penerimaan yang diperoleh dari penjualan tersebut, selalu ada kewajiban petani untuk mengeluarkan berbagai macam biaya, baik biaya usaha maupun biaya hidup keluarga (Adiwilaga, 1982).

2. Biaya Produksi

Hernanto (1988), menyatakan bahwa biaya produksi dalam suatu usahatani adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam proses produksi menjadi produk. Pengertian biaya menurut Soekartawi (2002) adalah satuan-satuan nilai dari alat-alat produksi yang telah dikorbankan untuk suatu proses produksi. Sedangkan Adiwilaga (1982) berpendapat bahwa biaya usaha adalah seluruh pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu (umumnya ditetapkan 12 bulan).

Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi dua (Soekartawi dkk, 1986) yaitu :

1. Biaya tetap (*fixed cost*), yaitu biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contoh biaya tetap antara lain, sewa tanah, pajak, alat pertanian, penyusutan alat.
2. Biaya tidak tetap (*variable cost*), yaitu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi, contohnya biaya untuk sarana

produksi. Kalau menginginkan produksi yang tinggi, maka tenaga kerja perlu ditambah, pupuk juga perlu ditambah dan sebagainya.

Menurut Hastuti dan Rahim (2007) biaya penyusutan merupakan bagian dari biaya tetap. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi komoditas pertanian.

Salah satu cara perhitungan biaya penyusutan sebuah mesin atau alat produksi adalah dengan menggunakan metode penyusutan dengan persentase tetap dari harga beli, dan unsur-unsur yang harus diketahui adalah (Bambang dan Kartosapoetra, 1988) :

1. Harga beli alat produksi
2. Perkiraan umur ekonomis dari alat tersebut
3. Perkiraan nilai sisa atau alat itu setelah umur ekonomisnya berakhir

Dalam usahatani dikenal dua macam biaya, yaitu biaya tunai atau biaya yang dibayarkan dan biaya tidak tunai atau biaya yang tidak dibayarkan. Biaya yang dibayarkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja luar keluarga, biaya untuk pembelian *input* produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan. Dalam usaha peternakan antara lain untuk biaya penggembalaan, biaya pemeliharaan pakan, biaya pemeliharaan kandang, dan jenis upah kegiatan lainnya (Soekartawi, 2002).

3. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

Pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga merupakan hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga, baik rumah tangga petani ataupun bukan rumah tangga petani. Khusus rumah tangga petani yang biasanya hidup di pedesaan untuk pemenuhan kebutuhan diperlukan pendapatan, baik dari pekerjaan pokok sebagai petani maupun pekerjaan sampingan dari anggota keluarga yang bekerja. Besarnya pengeluaran dari hasil pendapatan ditentukan oleh konsumsi (pangan/non pangan) (Hastuti dan Rahim, 2007).

Menurut Supardi (2002) pendapatan rumah tangga di pedesaan pinggiran hutan berasal dari lahan usahatani (sendiri, menyewa), memelihara ternak, menebang kayu, buruh tani maupun bekerja di luar sektor kehutanan. Kemudian ditinjau dari besar-kecilnya pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun sosial/kependudukan dari anggota rumah tangga.

Menurut Soekartawi (2002) pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan kotor usaha tani (*gross farm income*) adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pendapatan kotor usahatani merupakan ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani. Sedangkan pengeluaran total usahatani (*total farm expenses*) adalah nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan didalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani (Soekartawi dkk, 1986).

Dalam menaksir pendapatan kotor, semua komponen produk yang tidak dijual harus dinilai berdasarkan harga pasar. Produk tersebut dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga pasar. Perhitungan pendapatan kotor harus juga mencakup semua perubahan nilai tanaman di lapangan antara permulaan dan akhir tahun produksi. Perubahan semacam itu sangat penting terutama untuk tanaman tahunan. Meskipun demikian, maka pada umumnya perubahan ini diabaikan karena penilaiannya sangat sukar (Soekartawi dkk, 1986).

Menurut Hernanto (1988), cara untuk menghitung pendapatan usahatani yaitu dengan menjumlahkan total pendapatan dari berbagai sumber, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani adalah:

- a) Luas lahan usaha meliputi areal tanaman, dan luas pertanaman.
Sedangkan pada peternakan dikenal jumlah ternak per usahatani dan jumlah ternak produktif per usahatani
- b) Tingkat produksi, ukuran-ukuran tingkat produktifitas per hektar dan indeks pertanaman
- c) Pilihan dan kombinasi cabang usaha
- d) Intensitas pengusahaan pertanaman
- e) Efisiensi tenaga kerja

Pendapatan usahatani digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan diluar kebutuhan rumah tangga. Besarnya pengeluaran rumah tangga petani dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Menurut Supardi

(2002) pola pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan bervariasi menurut kondisi lahan pertanian yang ada.

D. Kontribusi Hasil Hutan Terhadap Pendapatan Masyarakat

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kaskoyo (2009) di Desa Bumi Arum Kecamatan Pringsewu mengenai Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat diketahui bahwa kontribusi pendapatan dari hutan rakyat di Desa Arum mencapai 23,39%. Kontribusi hutan rakyat relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan usaha tani tanaman pangan yang terdiri dari padi, kacang panjang, jagung, dan cabe yaitu sebesar 27,36 % (Kaskoyo, 2009).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2008) mengenai Kontribusi Repong Damar Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Petani Damar Di Desa Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat masyarakat di Desa Pahmungan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari repong damar. Rata-rata total pendapatan rumah tangga yang diperoleh di Desa Pahmungan sebesar Rp 11.978.548,17/thn dengan rata-rata luas lahan yang dikelola seluas 1,75 ha. Kontribusi yang diberikan repong damar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup petani repong damar sebesar 51,64%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widiarti (2006) pada lokasi yang sama, kontribusi yang diperoleh yaitu sebesar 57,28%.

